



## **PERSEPSI EKONOMI ISLAM MASYARAKAT TERHADAP RENCANA PENGAMBILAN KEBIJAKAN PROYEK KRL SIDOARJO-SURABAYA**

**Apriliyah Sasmita Hidayat<sup>1</sup>, Mazro'atus Sa'adah<sup>2</sup>**

Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya<sup>1,2</sup>

### **ABSTRACT**

*The Sidoarjo-Surabaya Electric Railway (KRL) project is aimed at improving connectivity and stimulating local economic growth. This study examines the economic perception of the project from an Islamic perspective and its alignment with the principles of Maqashid Sharia. The project is expected to create fair and sustainable economic benefits for the communities involved. The research finds that community support for the project is influenced by their involvement in decision-making processes, their perception of economic advantages, and the project's adherence to principles of social justice and environmental sustainability. In conclusion, the study emphasizes the importance of inclusive policies that prioritize economic justice. The project should not be solely considered a transportation solution, but also a catalyst for community prosperity in a sustainable manner.*

**Keywords:** Public Perception, Islamic Economics, Transportation Policy, KRL Project.

### **ABSTRAK**

Proyek Kereta Rel Listrik (KRL) Sidoarjo-Surabaya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian ini mengkaji persepsi ekonomi dari proyek tersebut dari perspektif Islam dan keselarasannya dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Proyek ini diharapkan dapat menciptakan manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terlibat. Penelitian ini menemukan bahwa dukungan masyarakat terhadap proyek ini dipengaruhi oleh keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan, persepsi mereka terhadap keuntungan ekonomi, dan kepatuhan proyek terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan inklusif yang mengutamakan keadilan ekonomi. Proyek ini seharusnya tidak hanya dianggap sebagai solusi transportasi, tetapi juga sebagai katalisator untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Persepsi Masyarakat, Ekonomi Islam, Kebijakan Transportasi, Proyek KRL.

Copyright (c) 2024 Apriliyah Sasmita Hidayat<sup>1</sup>, Mazro'atus Sa'adah<sup>2</sup>.

✉ Corresponding author : Apriliyah Sasmita Hidayat  
Email Address : 08020421047@unsby.ac.id

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di suatu daerah memiliki hubungan yang kuat dengan upaya pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Salah satu program pembangunan utama yang dilaksanakan adalah pengembangan infrastruktur fisik, seperti fasilitas listrik, transportasi, telekomunikasi, jaringan irigasi, penyediaan air bersih, sistem pengelolaan limbah, dan sanitasi. Infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi, baik pada sektor rumah tangga konsumsi maupun sektor usaha.

Pembangunan infrastruktur transportasi merupakan salah satu peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu proyek transportasi yang tengah menjadi perhatian adalah pengembangan Kereta Rel Listrik (KRL) yang menghubungkan wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Proyek ini diinisiasi sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan konektivitas antar kota serta mendukung mobilitas masyarakat yang tinggi di kawasan tersebut. Selain itu, proyek KRL ini juga diharapkan dapat mengurangi beban lalu lintas di jalan raya, yang selama ini menjadi salah satu kendala utama bagi aktivitas ekonomi dan sosial di kawasan metropolitan Surabaya.

Dalam konteks ekonomi Islam, proyek KRL ini dapat berperan dalam menciptakan manfaat ekonomi yang seimbang bagi masyarakat, sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah, yang meliputi perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), harta (hifz al-mal), dan kemaslahatan umum. Proyek ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi transportasi, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar dan mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan stasiun KRL.

Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta merupakan pusat ekonomi, pendidikan, dan budaya di Jawa Timur. Setiap harinya, ribuan masyarakat dari wilayah sekitar, termasuk Sidoarjo, melakukan perjalanan ke Surabaya untuk bekerja, bersekolah, atau mengakses berbagai layanan publik. Kondisi ini menyebabkan lalu lintas yang padat, terutama pada jam-jam sibuk, sehingga membutuhkan solusi transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dalam hal ini, keberadaan KRL diharapkan mampu menjadi solusi yang dapat mengurangi kemacetan, menghemat waktu perjalanan, dan menekan biaya transportasi bagi masyarakat.

Namun, setiap proyek infrastruktur berskala besar seperti ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama dalam hal penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil. Persepsi masyarakat terhadap proyek KRL sangat mempengaruhi tingkat dukungan dan partisipasi mereka. Persepsi ini dapat terbentuk dari berbagai faktor seperti manfaat ekonomi yang dirasakan, potensi dampak negatif, serta pengalaman masyarakat dalam interaksi dengan kebijakan publik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai persepsi ekonomi masyarakat menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat kesuksesan implementasi proyek KRL Sidoarjo-Surabaya.

Beberapa studi menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap proyek infrastruktur tidak hanya bergantung pada aspek teknis atau operasional, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dirancang dan diimplementasikan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh (Arifin, 2022) menemukan bahwa persepsi

positif terhadap proyek infrastruktur terjadi ketika masyarakat merasa bahwa mereka memperoleh manfaat langsung dari proyek tersebut, seperti peningkatan aksesibilitas, peningkatan nilai properti, dan peluang ekonomi baru yang terbuka. Sebaliknya, persepsi negatif dapat muncul apabila masyarakat merasa dirugikan, misalnya melalui relokasi, polusi selama proses konstruksi, atau perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan harapan.

KRL Sidoarjo-Surabaya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat ekonomi, antara lain peningkatan aksesibilitas yang dapat mempercepat pergerakan orang dan barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar stasiun-stasiun KRL. Peningkatan aksesibilitas ini diharapkan akan mempermudah pekerja untuk melakukan perjalanan antar kota, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Selain itu, adanya KRL juga diprediksi dapat meningkatkan nilai properti di sekitar jalur KRL dan stasiun, karena kemudahan akses transportasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih tempat tinggal atau lokasi usaha. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah transportasi, tetapi juga untuk menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

Namun, terlepas dari berbagai manfaat yang dijanjikan, proyek ini juga menghadapi tantangan dalam hal penerimaan masyarakat. Beberapa kekhawatiran yang muncul antara lain potensi dampak negatif selama fase konstruksi, seperti gangguan lalu lintas, kebisingan, dan polusi, serta kekhawatiran akan kemungkinan relokasi bagi penduduk yang tinggal di sekitar jalur proyek. Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai bagaimana pemerintah dan pihak berwenang mengelola aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan dari proyek ini. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengembangan KRL ini dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Kebijakan yang inklusif dan partisipatif cenderung lebih diterima oleh masyarakat, karena mereka merasa menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi ekonomi masyarakat terhadap kebijakan proyek KRL Sidoarjo-Surabaya, dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis tinjauan literatur. Kajian ini juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat dalam kerangka ekonomi Islam, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat dukungan masyarakat melalui prinsip keadilan dan inklusivitas. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai persepsi masyarakat, diharapkan pengambilan kebijakan dapat lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan serta kekhawatiran masyarakat. Hal ini penting agar proyek KRL tidak hanya menjadi solusi transportasi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mengelola persepsi masyarakat terkait proyek KRL. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai persepsi masyarakat, diharapkan pengambilan kebijakan dapat lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan serta kekhawatiran masyarakat. Hal ini penting agar proyek KRL tidak hanya menjadi solusi bagi masalah transportasi, tetapi juga dapat

diterima dengan baik oleh masyarakat dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan ekonomi wilayah.

Pembahasan tentang pembangunan tidak dapat dipisahkan dari aspek infrastruktur, yang saat ini menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan di Indonesia. Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus adalah transportasi. Menurut Steenbrink (1974) yang dikutip oleh (Limbong, 2024), transportasi didefinisikan sebagai proses pemindahan orang atau barang dengan menggunakan alat atau kendaraan dari satu lokasi ke lokasi lain yang secara geografis terpisah. Pada awalnya, masyarakat mengandalkan berjalan kaki atau memanfaatkan tenaga hewan sebagai sarana transportasi untuk berpindah tempat. Namun, metode ini memiliki keterbatasan dalam hal efektivitas dan efisiensi, terutama dalam distribusi komoditas penting seperti gula, kopi, dan rotan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kendaraan bermotor diperkenalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda, yang saat itu bertujuan untuk memudahkan pengawasan wilayah-wilayah yang jauh dari pusat administrasi pemerintahan.

Transportasi memainkan peran krusial dalam mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari, terutama dalam konteks ekonomi seperti distribusi barang dan jasa angkutan. Di Indonesia, masyarakat sangat bergantung pada berbagai moda transportasi, termasuk transportasi darat, udara, dan laut. Namun, transportasi darat mendapatkan perhatian khusus karena kemampuannya mengurangi waktu perjalanan dan mengatasi kemacetan di perkotaan (Rofiqoh et al., 2020).

Proyek transportasi dapat didefinisikan berdasarkan tahapannya, yang mencakup proses perencanaan, perancangan, pelaksanaan, hingga pengoperasian dan pengelolaan. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan satu atau beberapa tahapan tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari proyek transportasi. Dalam evaluasi proyek, definisi proyek transportasi biasanya lebih spesifik, yaitu merujuk pada suatu bentuk investasi di sektor transportasi yang memenuhi kelayakan teknis dan ekonomis untuk mencapai tujuan tertentu.

Penyediaan sistem transportasi yang efektif, sesuai, dan seimbang dengan kebutuhan serta kondisi wilayah tertentu harus dilakukan melalui perencanaan yang matang. Perencanaan transportasi adalah proses memilih atau menentukan alternatif pengadaan fasilitas transportasi untuk mencapai tujuan optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat berdampak negatif di masa depan, setiap kebijakan, tindakan, atau keputusan harus didahului oleh analisis dan perhitungan yang cermat. Proses ini dilanjutkan dengan evaluasi menyeluruh, mencakup analisis keuntungan dan kerugian baik dari segi finansial maupun sosial. (Miro, 2005).

Penelitian ini membutuhkan peran dari masyarakat untuk mengambil persepsi masyarakat local sebagai pihak yang nantinya akan terkena imbasnya, baik positif maupun negatif. Persepsi merupakan proses kompleks yang melibatkan penerimaan dan pengolahan pesan atau informasi dalam otak manusia. Melalui persepsi, manusia secara berkelanjutan berinteraksi dan membangun hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Interaksi ini terjadi melalui berbagai indera, di antaranya indera penglihatan, pendengaran, peraba, dan perasa, yang memungkinkan manusia memahami dan menafsirkan berbagai rangsangan dari luar (Nurchotimah, 2018).

Selain persepsi masyarakat, prinsip-prinsip Islam juga dibutuhkan. Prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan keberlanjutan. Berikut adalah penjelasan dari keempat poin tersebut (Agustina, 2016):

1. Tanggung Jawab Negara: Dalam sistem ekonomi dan politik Islam, negara memegang tanggung jawab utama dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan bukan untuk mencari keuntungan pribadi atau kepentingan politik tertentu, seperti yang sering terjadi dalam sistem kapitalis. Infrastruktur dianggap sebagai bagian dari pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, bukan sebagai proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
2. Sistem Ekonomi Islam: Dalam sistem ekonomi Islam, konsep kepemilikan (milkiyyah) dan pengelolaan (tasharruf) barang dan jasa harus dilakukan dengan adil dan memastikan distribusi yang merata (tauzi'). Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar rakyat dapat terpenuhi, termasuk sandang, pangan, pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dengan sistem ekonomi yang sehat, negara mampu membiayai proyek-proyek pembangunan tanpa membebani rakyat.
3. Rancangan Tata Kelola Ruang: Dalam negara khilafah, perencanaan wilayah dibuat sedemikian rupa untuk meminimalkan kebutuhan transportasi. Kota-kota dirancang agar semua kebutuhan dasar dapat diakses dengan mudah, seperti yang terlihat pada pembangunan Baghdad yang mencakup berbagai fasilitas penting dalam satu kawasan, sehingga warga tidak perlu melakukan perjalanan jauh.
4. Pendanaan dari Baitul Mal: Pembangunan infrastruktur dalam negara khilafah didanai melalui Baitul Mal, yang mengelola kekayaan milik umum dan negara. Pendanaan ini tidak bergantung pada pungutan dari masyarakat, sehingga meringankan beban rakyat. Negara memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan publik dan menjalankan proyek-proyek pembangunan tanpa membebani masyarakat dengan biaya langsung.

Kereta Rel Listrik (KRL) merupakan moda transportasi yang memiliki sejumlah keunggulan komparatif yang signifikan. Di antaranya adalah efisiensi bahan bakar dan energi, rendahnya tingkat polusi, kemampuan menghindari kemacetan, serta kapasitas angkut massal. KRL bukan sekadar alat transportasi biasa, melainkan sistem mobilisasi strategis yang berperan penting dalam mendukung pergerakan penumpang dan barang di sepanjang jalur rel. Keunggulan-keunggulan tersebut menjadikan KRL sebagai solusi potensial untuk mengatasi kompleksitas permasalahan transportasi perkotaan. Khususnya bagi masyarakat yang berdomisili di luar Jakarta, seperti Bogor, KRL diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan mobilitas mereka, baik pada saat berangkat maupun pulang beraktivitas di pusat kota (Wayan Ray, 2019). KRL dipilih di Jawa Timur karena di Jabodetabek KRL menjadi transportasi darat andalan masyarakat setempat, Berdasarkan data hingga Juni 2018, jumlah rata rata pengguna KRL per hari mencapai 1.001.438 orang pada hari kerja, dengan jumlah pengguna per hari terbanyak mencapai 1.154.080 (Jayanti et al., 2021).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat dan pengambil kebijakan terhadap proyek pembangunan Kereta Rel Listrik (KRL) Sidoarjo-Surabaya. Dilakukan untuk memahami konteks proyek pembangunan KRL Sidoarjo-Surabaya, termasuk isu-isu terkait komunikasi, partisipasi masyarakat, dan mitigasi dampak negatif. Penelitian ini didesain sebagai studi eksploratif kualitatif, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam pandangan, harapan, dan kekhawatiran berbagai pemangku kepentingan terkait proyek KRL Sidoarjo-Surabaya. Penelitian dilakukan di wilayah Sidoarjo dan Surabaya, yang merupakan lokasi utama yang akan dilalui oleh proyek KRL dengan kurun waktu penelitian pada bulan Oktober 2024 – November 2024. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi geografis dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Data primer didapat dari wawancara dengan warga setempat, dan data sekunder didapat dari penelitian terdahulu dan berita yang didapat dari sumber-sumber terpercaya. Kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan utama. Pendekatan ini membantu memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengembangan jaringan Kereta Rel Listrik (KRL) lintas Surabaya-Sidoarjo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dikutip pada artikel berita oleh (Rahayu, 2024), mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menggandeng Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), sebuah bank pembangunan dan investasi milik pemerintah Jerman, sebagai investor utama. Budi Karya menyatakan bahwa Indonesia dan KfW saat ini tengah menyelesaikan studi untuk elektrifikasi jalur tersebut. Meskipun ia tidak menyebutkan secara pasti waktu dimulainya proyek ini, Budi Karya menegaskan bahwa KRL Surabaya-Sidoarjo berada pada tahap studi lanjutan dan akan segera bekerja sama dengan pihak KfW. Dalam upaya pengembangan transportasi publik, pihak yang bersangkutan sedang merancang kerja sama strategis dengan lembaga keuangan KfW untuk mewujudkan elektrifikasi layanan angkutan bus melalui skema buy the service (BTS). Kerja sama ini difokuskan pada tiga kota besar di Indonesia, yaitu Surabaya, Semarang, dan Makassar, yang dinilai memiliki potensi signifikan untuk pengembangan transportasi perkotaan yang lebih berkelanjutan. Saat ini, kedua pihak tengah melakukan serangkaian diskusi intensif untuk membahas skema pembayaran pinjaman (loan repayment) yang akan disediakan KfW guna mendukung program elektrifikasi bus tersebut. Meskipun demikian, proses negosiasi masih berlangsung dan belum ada target waktu pasti kapan pembahasan akan selesai. Hal ini menunjukkan kompleksitas perundingan yang membutuhkan kajian mendalam terkait aspek teknis dan finansial program.

Proyek Kereta Rel Listrik (KRL) Sidoarjo-Surabaya diharapkan mampu memberikan solusi transportasi yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah kemacetan serta mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Dari perspektif ekonomi Islam, proyek ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan kemaslahatan (maslahah) bagi masyarakat melalui penyediaan transportasi yang mudah diakses, efisien, dan mendukung keberlanjutan. Dalam hal ini, persepsi ekonomi masyarakat terhadap proyek KRL memainkan peran penting dalam

menentukan tingkat keberhasilan kebijakan, karena dukungan masyarakat adalah bagian integral dari penerapan prinsip keadilan dan partisipasi dalam ekonomi Islam.

Salah satu faktor utama yang membentuk persepsi masyarakat adalah manfaat ekonomi yang diharapkan dari proyek KRL. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Adinata et al., 2020) persepsi masyarakat terhadap proyek transportasi massal seperti KRL cenderung positif ketika proyek tersebut dipandang mampu meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi transportasi, yang pada gilirannya dapat menghemat biaya perjalanan harian. Studi ini juga mengungkapkan bahwa adanya KRL dapat menciptakan peluang ekonomi baru, seperti berkembangnya usaha kecil dan menengah di sekitar stasiun, yang menarik lebih banyak konsumen karena mudah diakses melalui transportasi publik. Selain itu, penelitian oleh (Irawan & Benu, 2021) menyebutkan bahwa proyek KRL dapat berdampak pada peningkatan nilai properti di wilayah sekitar jalur KRL. Hal ini disebabkan oleh peningkatan permintaan hunian di kawasan yang lebih dekat dengan akses transportasi massal, yang memungkinkan mobilitas lebih mudah dan efisien bagi masyarakat. Peningkatan nilai properti ini bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong dukungan masyarakat terhadap proyek KRL.

Adanya proyek KRL juga dianggap dapat menciptakan peluang kerja baru selama proses konstruksi dan setelah operasional KRL dimulai. Menurut beberapa literatur penelitian terdahulu, proyek-proyek infrastruktur transportasi di Indonesia, seperti proyek MRT dan KRL di Jabodetabek, telah berhasil membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat, baik dalam sektor konstruksi, operasional, maupun pelayanan terkait. Pengalaman ini dapat menjadi acuan bagi proyek KRL Sidoarjo-Surabaya dalam meningkatkan dukungan masyarakat melalui penciptaan peluang kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, studi dari (Fadhila, 2022) menunjukkan bahwa stasiun-stasiun KRL di wilayah metropolitan dapat menjadi pusat ekonomi baru, di mana UMKM dapat berkembang pesat. Keberadaan stasiun yang menjadi titik kumpul masyarakat mendorong terbentuknya klaster bisnis baru, seperti pusat kuliner, layanan ritel, dan jasa lainnya. Pengembangan ini memberikan peluang kepada pengusaha kecil untuk berpartisipasi dalam ekonomi lokal, yang pada akhirnya memperkuat persepsi positif terhadap proyek KRL.

Meskipun banyak manfaat ekonomi yang diharapkan, persepsi masyarakat juga dipengaruhi oleh kekhawatiran terkait dampak sosial dan lingkungan dari proyek KRL. Masyarakat sering kali khawatir terhadap potensi dampak negatif dari proyek infrastruktur besar, seperti polusi, kebisingan, kemacetan sementara selama fase konstruksi, serta relokasi penduduk yang mungkin terjadi. Persepsi ini dapat memengaruhi dukungan masyarakat terhadap proyek jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk secara proaktif mengelola dampak negatif potensial ini melalui perencanaan yang matang dan transparan serta komunikasi yang efektif dengan masyarakat terdampak. Dalam salah satu studi menekankan bahwa untuk meminimalkan resistensi dari masyarakat, pihak pelaksana proyek harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan dalam setiap tahap proyek. Misalnya, menerapkan teknologi ramah lingkungan selama pembangunan dan operasional KRL, seperti penggunaan energi listrik yang lebih bersih dibandingkan dengan moda transportasi berbahan bakar

fosil, akan membantu memperbaiki persepsi masyarakat terkait keberlanjutan proyek ini.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan juga menjadi faktor penting yang dapat memperkuat persepsi positif terhadap proyek KRL. Partisipasi ini tidak hanya dalam bentuk konsultasi publik, tetapi juga keterlibatan dalam diskusi mengenai manfaat ekonomi, penentuan lokasi stasiun, serta pengelolaan dampak sosial dan lingkungan. Dengan demikian, inklusivitas dalam pengambilan kebijakan akan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap proyek, sehingga memperkuat dukungan terhadap implementasi kebijakan KRL. Berdasarkan pengalaman implementasi KRL di berbagai kota besar, seperti di Jabodetabek, keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan dan sosialisasi sangat penting untuk meningkatkan penerimaan publik. Hal ini termasuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kekhawatiran mereka dan memberikan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh pihak berwenang dalam perumusan kebijakan.

Proyek KRL harus dirancang untuk memberikan manfaat yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa meminggirkan kelompok tertentu. Prinsip keadilan (al-'adl) dalam ekonomi Islam menuntut agar proyek ini tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi mencakup manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat sekitar. Misalnya, selain peningkatan aksesibilitas, proyek ini diharapkan juga dapat memberikan dampak positif terhadap nilai properti dan kesempatan ekonomi yang merata bagi semua kelompok, khususnya bagi kalangan bawah yang sangat memerlukan akses transportasi terjangkau. Implementasi kebijakan yang inklusif dan berkeadilan akan memperkuat dukungan masyarakat karena sejalan dengan prinsip kesejahteraan bersama.

## KESIMPULAN

Persepsi ekonomi masyarakat merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan proyek KRL Sidoarjo-Surabaya. Dari perspektif ekonomi Islam, kebijakan terkait proyek ini perlu didasari oleh prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan bersama (maslahah), dan keberlanjutan. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya akan menjadi solusi transportasi yang mengatasi masalah kemacetan, tetapi juga dapat menjadi penggerak ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi kawasan Sidoarjo-Surabaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh harapan akan manfaat ekonomi langsung, seperti peningkatan aksesibilitas, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan UMKM di sekitar jalur KRL. Selain itu, faktor sosial dan lingkungan juga memainkan peran penting dalam menentukan dukungan masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, hal ini mencerminkan pentingnya pendekatan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta perlunya mitigasi dampak negatif yang mungkin timbul.

Rekomendasi kebijakan meliputi sosialisasi yang lebih inklusif, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui UMKM. Dengan pendekatan yang berbasis prinsip-prinsip syariah, diharapkan proyek KRL dapat menciptakan manfaat ekonomi yang luas dan berkeadilan, sehingga tercipta dukungan yang berkelanjutan

dari masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan maslahah akan membantu memastikan bahwa proyek ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga menjadi kontribusi jangka panjang bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, R., Wike, W., & Wanto, A. (2020). Public Transport in Developing Countries. *Journal of Public Administration Studies*, 6.
- Agustina, Y. (2016, March). Pengaturan Pembangunan Infrastruktur dalam Islam (Bagian 2-Selesai). *VOA-Islam*.
- Arifin, B. (2022). Infrastruktur Konektivitas, Peran Pemerintah, dan Perkembangan Sosial Ekonomi Regional: Bukti dari Kalimantan. *JIPM*, 7.
- Fadhila, M. (2022). *Pemberdayaan Ekonomi Lokal melalui Proyek Transportasi Publik*.
- Irawan, F., & Benu, F. S. (2021). Aspek Penilaian dalam Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. *JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK*, 5(2), 154–168. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v5i2.1242>
- Jayanti, R. A., Joewono, T. B., & Rizki, M. (2021). Aksesibilitas Stasiun rel Listrik Commuter Line berdasarkan Persepsi Wanita. *Jurnal Transportasi*, 21(1), 63–72. <https://doi.org/10.26593/jtrans.v21i1.4904.63-72>
- Limbong, I. C. (2024). Pembangunan Infrastruktur Transportasi Berkelanjutan di Indonesia. *Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1188-1541/umum/kajian-opini-publik/pembangunan-infrastruktur-transportasi-berkelanjutan-di-indonesia-infrastruktur-transportasi>
- Miro, F. (2005). Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa, Perencana, dan Praktisi. *Erlangga*.
- Nurchotimah, S. (2018). Persepsi Masyarakat tentang Kebijakan Transportasi Online di Terminal Purabaya Sidoarjo. *UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Rahayu, I. R. (2024, Mei). Mau Bangun KRL Surabaya-Sidoarjo, Menhub Gandeng Bank Pembangunan Jerman. *Kompas.Com*.
- Rofiqoh, L., Malikah, A., & Anwar, S. A. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Jasa Transportasi Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang). 09(04).
- Wayan Ray, R. I. (2019). Perencanaan Manajemen Strategis Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus pada KRL Commuter Line Bogor-Jakarta). *Business Management Journal*, 14(2). <https://doi.org/10.30813/bmj.v14i2.1474>

